

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba. Sebagai lembaga pemerintahan tujuan bukan mencari keuntungan tetapi semata-mata untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya meningkatkan keamanan dan kenyamanan mutu pendidikan, mutu kesehatan, dan lain-lain (Istiyani, 2011).

Salah satu masalah pengelolaan keuangan yang dihadapi pemerintah adalah anggaran. Menurut Kenis (1979) dalam Waskito (2009) mengemukakan anggaran merupakan pernyataan mengenai apa yang diharapkan dan direncanakan dalam periode tertentu di masa yang akan datang. Tujuan anggaran pada pemerintah sangat berbeda dengan anggaran pada perusahaan biasa. Tujuan pemerintah adalah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat bukan pada profit semata, sedangkan pada perusahaan tujuan utama adalah profit yang sebesar besarnya dan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Dalam hal ini maka pemerintah dan perusahaan akan berbeda dalam proses penganggarannya. Anggaran pemerintah digunakan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat dengan tujuan untuk kemakmuran masyarakat,

sedangkan anggaran perusahaan digunakan untuk membiayai segala operasi perusahaan untuk mencari profit perusahaan.

Menurut Mardiasmo (2009;63) anggaran sektor publik sangat penting karena:

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), dan *trade offs*.
3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

Menurut Waskito (2009), untuk melihat prestasi kerja atau kinerja pemerintah diperlukan indikator kinerja yang salah satunya adalah kinerja manajerial. Dari indikator yang ditetapkan tersebut, pemerintah dapat menilai kinerja manajerial aparatnya. Penilaian kinerja tidak dinilai berdasarkan *profit* yang diperoleh, karena pemerintah bukan merupakan organisasi penacari laba semata seperti pada perusahaan. Menurut Michael, dan Troy (2000) dalam Waskito (2009) menjelaskan untuk mengukur kinerja sebuah pemerintah lokal dalam perbandingannya dengan tujuan yang ditetapkan maka diperlukan

akuntabel oleh pemerintah lokal. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah para pembuat kebijakan dan profesional harus merumuskan visi dan tujuan dari rencana strategis mereka dengan menggunakan input dari masyarakat/publik. Jika input dari masyarakat ini tidak di akomodasi maka akan mengundang kritikan, walaupun pemerintahan lokal sudah melaksanakan secara efisien sekalipun.

Misi utama Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menetapkan bahwa pemerintah dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, asas dekonsentralisasi, dan asas tugas pembantuan. Asas desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah provinsi dan pemerintah kota sebagai daerah otonomi. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Adanya pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah (Bastian,2006 : 12)

Undang-undang tersebut merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan desentralisasi menjadi suatu fenomena global termasuk Indonesia. Desentralisasi melahirkan otonomi daerah yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan dan lebih mendekatkan fungsi pemerintahan kepada masyarakat. Desentralisasi juga diharapkan mampu

meningkatkan percepatan pembangunan dalam usaha pencapaian tujuan negara yaitu masyarakat adil dan makmur (Avionita, 2013).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial adalah komitmen organisasi. Komitmen menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (*goal*) yang ingin dicapai oleh organisasi. Bagi individu yang berkomitmen tinggi, pencapaian tujuan organisasi merupakan hal penting yang harus dicapai serta berpandangan positif dan berbuat yang terbaik untuk kepentingan organisasi. Individu yang berkomitmen tinggi akan menghindari kesenjangan anggaran, dan akan menggunakan informasinya agar anggaran menjadi lebih akurat. Sebaliknya, individu yang berkomitmen rendah cenderung tidak memberikan informasi yang mereka miliki kepada atasan karena bawahan tidak bersungguh-sungguh memenuhi tujuan organisasi (Fibrianti dan Riharjo, 2013).

Menurut Anoraga (2001) dalam Ramadanil (2013) motivasi kerja adalah dorongan, keinginan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dengan berpartisipasi aktif baik waktu maupun biaya demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi akan melakukan suatu pekerjaan dengan giat dan gigih untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Sebaliknya jika orang itu memiliki motivasi yang rendah maka ia akan kurang bergairah dalam melakukan pekerjaannya, mereka tidak mau bekerja keras dengan menggunakan kemampuan, kecakapan, dan keterampilan yang dimilikinya.

Penelitian Hidrayadi (2015) tentang pengaruh desentralisasi, partisipasi anggaran, komitmen organisasi, dan motivasi kerja terhadap kinerja manajerial

SKPD kota pekanbaru menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD kota pekanbaru. Dengan adanya desentralisasi di organisasi pemerintah maka telah mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan memberikan wewenang kepada bawahan untuk berpartisipasi dalam mengambil suatu keputusan guna mencapai tujuan- tujuan organisasi. Partisipasi anggaran, komitmen organisasi dan motivasi kerja juga berpengaruh terhadap kinerja pada SKPD kota pekanbaru, sehingga hal tersebut memudahkan untuk tercapainya tujuan- tujuan organisasi.

Hal ini berbeda dengan penelitian Medhayanti dan Suardana (2015) yang merupakan pengembangan dari penelitian Amertadewi (2013) . Penelitian yang mengambil sample di kota Denpasar ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh negative terhadap kinerja manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa atasan yang memiliki inisiatif yang rendah untuk memprakarsai diskusi dalam penyusunan anggaran, sehingga berdampak pada kinerja manajerial yang semakin menurun.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka peneliti ingin menguji kembali penelitian mengenai “Pengaruh Desentralisasi, Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Manajerial” yang pernah dilakukan oleh Hidrayadi (2015) di Kota Pekanbaru. Perbedaan penelitian ini adalah objek yang berbeda yaitu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Desentralisasi berpengaruh terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar ?
2. Apakah Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar ?
3. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar ?
4. Apakah Motivasi Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Desentralisasi terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk mengetahui pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
3. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
4. Untuk mengetahui pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan anggaran, desentralisasi, komitmen organisasi, dan motivasi kerja yang dapat meningkatkan kinerja manajerial di lingkungan pemerintah daerah.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta wawasan mengenai partisipasi anggaran, desentralisasi, komitmen organisasi, dan motivasi kerja terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah.

- b. Bagi akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai partisipasi anggaran, desentralisasi, komitmen organisasi, dan motivasi kerja terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang memuat landasan teori, kerangka konseptual, pengembangan hipotesis serta penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang desain penelitian, populasi, sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian serta metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pengolahan data dengan alat analisis yang diperlukan pengujian hipotesis dan pembahasan hasil analisis.

BAB V : PENUTUPAN

Bab ini berisi kesimpulan yang didukung oleh bukti- bukti dan hasil analisis data, saran- saran yang diberikan dan hasil penelitian dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.